

HUBUNGAN NEGARA-WARGA DAN DEMOKRASI LOKAL: STUDI KONFLIK TAMBANG DI BIMA

STATE-CITIZEN RELATIONS AND LOCAL DEMOCRACY: A STUDY ON MINING CONFLICT IN BIMA

Septi Satriani

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta
E-mail: septisatriani@gmail.com

Diterima: 27 Juli 2015; direvisi: 20 September 2015; disetujui: 10 Desember 2015

Abstract

This paper examines the state-citizens relation in a democratic context based on Charles Tilly's approach. Charles Tilly argues that the degree of democratic regime can be seen based on the state's capacity to accommodate public engagement. Following Charles Tilly's argument, a democratic regime provides equal political relation. On the contrary, state-citizen relation in an undemocratic regime is unequal. Based on Charles Tilly's perspective on state-citizen relations, Lambu's mining conflict, at district of Bima, West Nusa Tenggara Province is in the intersection category between low capacity democracy and low capacity undemocracy.

Keywords: State, Citizen, Relation, Local Democracy.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji hubungan negara-warga dalam konteks berdemokrasi dengan menggunakan perspektif demokrasi Charles Tilly. Dalam perspektif yang sederhana, Charles Tilly mengatakan bahwa sebuah rezim yang demokratis adalah rezim yang pada tingkat hubungan politik antara negara dengan warganya pada posisi yang tanpa batas, setara, aman terlindungi serta pada posisi konsultasi yang saling mengikat. Sementara yang tidak demokratis jika hubungan antara negara dengan warga itu dangkal, kurang terlindungi, kurang sejajar posisinya dan hubungannya konsultasinya juga tidak erat. Jika mendasarkan pada parameter-parameter milik Charles Tilly ini derajat demokrasi di Bima dalam kasus konflik Lambu masuk dalam kategori perpotongan antara kapasitas rendah demokratis dan kapasitas rendah tidak demokratis.

Kata Kunci: Negara, Warga, Hubungan, Demokrasi Lokal.

Pendahuluan: Lambu dalam Perspektif Bima

Kecamatan Lambu adalah kecamatan pemekaran dari Kecamatan Sape yang kini menjadi salah satu dari delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kecamatan ini memiliki dua belas desa dan terletak di ujung timur Kabupaten Bima. Penulis berkesempatan untuk pertama kali datang ke Lambu pada 23 April - 5 Mei 2011, beberapa

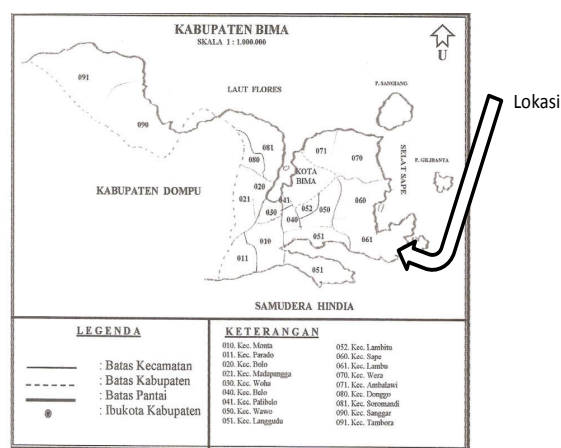
bulan setelah terjadinya konflik antara aparat negara dengan warga yang menyebabkan hancurnya kantor Kecamatan Lambu. Pada saat kejadian, warga yang merasa tuntutannya tidak diakomodir merusak dan membakar satu unit truk Polisi Pamong Praja atau satpol PP Kecamatan Lambu, satu unit mobil kijang patroli Satpol PP Camat Lambu, satu unit mobil dinas Camat Lambu, satu unit mobil pemadam kebakaran Kota Bima, satu unit mobil avanza, satu unit rumah

jabatan Camat Lambu, satu unit kantor Camat Lambu, delapan unit sepeda motor serta sepuluh unit komputer dan ruang aula Camat Lambu.¹

Konflik antara Negara dengan warga Lambu ini dipicu oleh kehadiran PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang ternyata telah mengantongi Izin Usaha Penambangan (IUP) sejak tahun 2008 yang kemudian diperbaharui dan dilakukan penyesuaian oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2010. Ijin Usaha Penambangan bernomor 188/45/357/004/2010 memberikan hak kepada PT SMN untuk beroperasi di lokasi seluas 24.980 ha di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu. Warga masyarakat Kecamatan Lambu merasa tidak diajak berdiskusi atas aktivitas PT SMN di lokasi tempat mereka tinggal. Masyarakat menduga bahwa ada prosedur yang diabaikan oleh negara dalam pemberian ijin usaha penambangan kepada PT SMN karena hanya kalangan aparat desa dan aparat kecamatan yang diberitahu oleh negara tentang adanya perusahaan yang akan beroperasi di wilayah Kecamatan Lambu.²

Masyarakat merasa berhak untuk menolak kehadiran PT SMN mengingat luas lokasi yang begitu besar dan ancaman bahaya lingkungan yang tidak sebanding dengan jaminan kesejahteraan atas proses penambangan yang akan terjadi di Kecamatan Lambu. Masyarakat mencoba menyampaikan kegelisahan mereka kepada Muhaimin, S.Sos, Camat setempat. Dan Camat pun berjanji akan menyampaikan kegelisahan warga kepada Bupati yang memiliki kedekatan dengan warga Lambu terutama menjelang pemilukada 2010 dimana Bupati ini hampir tiap minggu mengunjungi bahkan bermalam di Kecamatan Lambu.³ Sewaktu penulis berkunjung di Desa Sumi Kecamatan Lambu memang penulis dapati Bupati Ferry⁴ memiliki kediaman yang khusus dibangun di sana. Kediaman ini sengaja dibangun karena tingginya intensitas

Bupati Ferry mengunjungi wilayah ini. Selain itu, menurut pendapat pribadi penulis wajar bahwa Bupati Ferry membangun kediaman di lokasi tersebut mengingat lokasi tersebut sulit dijangkau karena jalan yang cukup terjal, berkelok-kelok serta membutuhkan waktu yang lama jika ditempuh darat dari Kota Bima melalui Sape. Beberapa kali ke wilayah tersebut, perut rasanya seperti dikocok-kocok mengingat jalan yang mesti dilalui cukup sempit dengan tikungan yang cukup tajam. Belum lagi jalan yang dilalui rawan longsor dan jarak jalan dengan sungai di sisi kiri jalan lumayan tinggi.



Sumber: Kabupaten Bima dalam Angka 2010

Gambar 1. Peta Lokasi Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sebagai ilustrasi awal, Kabupaten Bima dikepalai oleh seorang Bupati keturunan Kesultanan Bima cucu dari Sultan R. Salahuddin yang bernama H. Ferry Zulkarnain, S.T. Bupati ini menduduki posisi politis sebagai kepala Kabupaten Bima sejak tahun 2005. Ferry kemudian maju kembali dalam pemilihan Bupati Bima pada tahun 2010 dan menang meski kemenangannya banyak mengalami 'resistensi'.⁵

¹ Wawancara dengan Agus Mawardy, Ketua LMND Bima, 24 April 2011.

² Wawancara dengan Agus Mawardy, Ketua LMND Bima, 24 April 2011.

³ Wawancara dengan Agus Mawardy, Ketua LMND Bima, 24 April 2011.

⁴ Bupati Ferry Zulkarnaen meninggal dunia pada 26 Desember 2013.

⁵ Penulis menyimpulkan adanya resistensi berdasarkan begitu maraknya demo dan 'konflik' yang terjadi di Kabupaten Bima termasuk konflik Lambu yang secara langsung maupun tidak adalah imbas dari hasil pilkada 2010. Dari wawancara dengan beberapa narasumber yang saya temui di Kabupaten Bima sebagian besar mereka meyakini bahwa demo-demo yang hampir setiap hari ada, isu bom di pendopo ketika pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Ferry di depan DPRD Kabupaten Bima, konflik tambang Lambu dan Parado adalah bagian dari gambaran ketidakpuasan 'rival' Ferry pada Pemilukada 2010.

Diusung oleh 10 partai, yaitu Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Pelopor, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia,⁶ Ferry berhasil mendapatkan suara sebanyak 154.735 atau sekitar 60,76% dari total 254.629 suara sah.⁷ Dibandingkan dengan pilkada 2005, suara Ferry mengalami peningkatan sebesar 16,2% dari 100.438 suara atau sekitar 44,58% dari total jumlah suara sebanyak 225.304 suara pada pilkada Bima 2005.

Kedekatan bupati terpilih Ferry Zulkarnain dengan warga Lambu dapat dilihat dari hasil pemilihan suara pada Pemilu 2005 maupun 2010. Khusus di Kecamatan Lambu suara Ferry pada tahun 2005 mencapai 8.828 suara dari total suara pemilih di Kecamatan tersebut sebanyak 16.876. Jika diprosentase suara Ferry di kecamatan ini mencapai 52,31%. Sementara pada pemilu tahun 2010 suara Ferry di Kecamatan ini mencapai 12.294 dari total suara sebanyak 18.505 atau sekitar 66,44%. Hanya saja kedekatan ini tidak bisa menjamin Bupati Ferry mau mendengar dan mengikuti kemauan dari warga Lambu. Begitu juga dengan suara Ferry di Kecamatan lain. Ferry hampir selalu mampu meraih suara di atas 50% di setiap kecamatan yang tersebar di seluruh Bima.

⁶ Formulir Model B-KWK yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Bima.

⁷ Model DB-KWK Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima oleh KPUD Kabupaten Bima 14 Juni 2010.

Tabel 1. Perbandingan Perolehan Suara Ferry dengan Jumlah Pemilih per Kecamatan pada Pilkada 2005 dan Pemilu 2010⁸

No.	Kecamatan*	Perolehan Suara		Total Jumlah Pemilih Pemilu		Persentase perolehan suara dibanding jumlah pemilih per Kecamatan	
		2005	2010	2005	2010	2005	2010
1	Tambora	1.457	2.175	2.783	3.590	52.35	60.58
2	Sanggar	3.263	3.855	5.777	6.519	56.48	59.13
3	Madapangga	7.676	10.550	15.298	17.660	50.17	59.74
4	Bolo	9.085	17.917	24.209	27.103	37.52	66.11
5	Donggo****	8.522	7.220	15.418	9.390	55.27	76.89
6	Belo	8.284	7.647	26.065	14.018	31.78	54.55
7	Monta	8.245	8.986	21.988	19.197	37.50	46.80
8	Woha	8.409	13.967	21.693	25.212	38.76	55.39
9	Sape	12.497	16.875	27.697	30.112	45.12	56.04
10	Lambu	8.828	12.294	17.128	18.659	51.54	65.88
11	Wawo****	5.546	6.434	10.983	9.516	50.49	67.61
12	Langgudu	7.432	9.944	13.984	15.399	53.14	64.57
13	Wera	6.775	10.431	14.792	16.609	45.80	62.80
14	Ambalawi	4.365	5.859	10.627	11.762	41.07	49.81
15	TPS Khusus	54	35	151	195	35.76	17.94
16	Soromandi		5.664		8.879		63.79
17	Parado		3.818		5.142		74.25
18	Palibelo		8.793		15.058		58.39
19	Lambitu		2.271		3.040		74.70
Jumlah		100.438	154.735	228.593	257.060		

Catatan:

* Jumlah Kecamatan pada tahun 2010 mengalami perubahan akibat pemekaran dari 14 menjadi 18 kecamatan

** dan *** Jumlah ini termasuk suara yang tidak sah

**** Berdasarkan wawancara merupakan daerah yang memiliki ikatan emosional dengan Kerajaan Bima

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat elektabilitas Ferry cukup besar. Minimal kemenangannya memang dikehendaki oleh rakyat. Apalagi proses pemilu di kedua periode ini dilakukan secara langsung tidak seperti periode sebelumnya yang masih dipilih oleh DPRD. Disini warga bebas menentukan pilihan kepada siapakah suaranya akan diberikan. Namun fakta yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Pascakemenangan Ferry untuk kedua kalinya justru tuntutan gejolak dan resistensi banyak bermunculan. Salah satunya yang paling menonjol selain konflik tambang di Parado adalah konflik Lambu ini. Konflik ini berlangsung cukup lama dan negosiasi yang dilakukan warga Lambu kepada Bupati Ferry berlangsung dari tahun 2010 hingga pecah lagi di pelabuhan Sape 24 Desember 2011. Konflik di Sape adalah tuntutan dari konflik yang terjadi di Kecamatan Lambu dan tuntutan warga masih sama yaitu pencabutan SK tambang yang dikeluarkan Bupati Ferry

⁸ Septi Satriani (ed), *Dinamika Peran Elit Lokal dalam Pilkada Bima 2010*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm 55.

Nomor. 188/45/357/004/2010. Pada konflik ini dua remaja, Arif Rahman dan Mahfud, tewas tertembak peluru aparat. Seorang peserta demo lainnya, Arifudin, meninggal beberapa hari kemudian. Ada yang mengalami trauma terhadap desingan peluru dan atraksi kekerasan aparat di depan matanya yang menyebabkan kondisinya ambruk.⁹

Dari beberapa fakta inilah, tulisan ini ingin melihat bagaimana derajat demokrasi di Bima jika dilihat dari hubungan antara negara atau Bupati Ferry dengan warga terutama dalam konflik di Lambu. Tulisan selama ini lebih banyak melihat praktek demokrasi sebatas pada saat pemilukada berlangsung baik dari sisi penyelenggaranya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU),

Tabel 2. Kronologis Konflik Negara (Bupati Ferry) dengan Warga Lambu¹⁰

No.	Waktu	Tuntutan Warga	Respon Negara	Keterangan
1.	Oktober 2010	Menolak kehadiran industri tambang PT Sumber Mineral Nusantara.	Kekerasan.	35 orang luka ringan.
2.	Desember 2010	Menolak Surat Keputusan yang telah dikeluarkan Bupati Bima Nomor 188/45/357/004/2010 dengan luas 24.980 Ha yang beroperasi di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu dan seluas 14.318 Ha untuk PT. Indo Mineral Cipta Persada yang beroperasi di kecamatan Parado	Camat menerima dan berjanji akan menyampaikan ke Bupati Bima.	
3.	8 Januari 2011	Front Rakyat Anti Tambang menuntut dipertemukan dengan Perwakilan PT SMN.	Camat yang diharapkan mampu menjembatani tidak menemui dan mendengarkan tuntutan warga.	
4.	31 Januari 2010	Front Rakyat Anti Tambang atau FRAT dan warga meminta Camat Lambu menandatangani penolakan terhadap PT SMN.	Camat menolak dengan alasan bukan kewenangannya untuk menandatangani surat tersebut.	
5.	9 Februari 2011	Warga menolak himbauan pihak kecamatan untuk tidak berunjuk rasa dan hampir terjadi konflik.	Menghimbau warga untuk tidak berunjuk rasa.	
6.	10 Februari 2011	Menuntut Camat menandatangani surat penolakan terhadap IUP PT SMN Nomor 188/45/357/004/2010 dengan luas 24.980 Ha yang beroperasi di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu dan seluas 14.318 Ha untuk PT. Indo Mineral Cipta Persada yang beroperasi di kecamatan Parado.	Camat menolak dan memberitahu bahwa Bupati Ferry tidak dapat hadir di Lambu.	250 personil aparat Polres Kota Bima, 60 personil gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personil Brimob Polda NTB menyemprotkan gas air mata, peluru karet bahkan diduga ada juga yang menggunakan peluru tajam.

⁹ Data diperoleh dari Laporan yang dibuat oleh Komunitas Babuju.

¹⁰ Data diperoleh dari Laporan yang dibuat oleh LEAD (Liga Edukasi dan Advokasi), Komunitas Babuju, WALHI, <http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20110226/perlawanan-rakyat-parado-menolak-tambang-emas.html>, <http://www.rimanews.com/read/20110214/16560/lokasi-tambang-emas-dirusak-massa>, <http://www.walhi.or.id/index.php/id/ruang-media/kumpulan-kronologis-kasus-sda/1860-kronologis-penolakan-tambang-emas-di-kec-lambu-kab-bima-ntb.html>

7.	16 Februari 2011	Warga tiarap (sembunyi).	Sweeping ke desa dan lokasi dengan konflik tambang.	Lima orang yang dijadikan tersangka dan sedang ditahan di Mapolresta Kota Bima yakni Abidin asal Desa Sumi, Tasrif asal Desa Rato, Fesadin asal Desa Sumi, Nurrahman asal Desa Nae dan Mashulin asal Desa Lanta.
8.	19-23 Desember 2011	Warga dari Sape, Lambu dan daerah sekitar menduduki pelabuhan Sape menuntut pencabutan SK pertambangan di Lambu dan Parado.	Ratusan aparat gabungan dari TNI-Polri yang terdiri dari TNI BKO langsung dari Yon 743/SWY, Gebang Mataram, Brimob BKO dari Detasemen Mataram dan Detasemen Bima.	Tiga orang tewas versi masyarakat yang diamini oleh WALHI dan Komnasham. Sementara versi Negara hanya dua karena satu orang lainnya meninggal beberapa hari setelah kejadian dan dianggap tidak ada kaitannya dengan konflik di SAPE.

pemilihnya (partisipasi) maupun tingkah polah elitnya pada saat pemilukada berlangsung. Tulisan ini ingin melengkapi berbagai tulisan sebelumnya tentang praktek demokrasi dengan melihat hubungan Nnegara dengan Warga terutama setelah praktek pemilukada itu selesai. Dari paparan fakta lapangan terhadap kasus Lambu terutama bagaimana interaksi hubungan antara negara yang direpresentasikan oleh perilaku Bupati Ferry terhadap warga Lambu diharapkan mampu menjawab derajat demokratis tidaknya rezim Bupati Ferry tersebut.

Demokrasi dalam Perspektif Teori

Kajian-kajian yang selama ini menaruh perhatiannya pada demokrasi lebih banyak melihat bahwa tidak berhasilnya demokrasi pascaotoritarian disebabkan karena Indonesia masih berada dalam selang antara (transisi) dari otoritarian ke demokrasi itu sendiri. Dalam konteks transisi politik dari Rezim Soeharto kepada kepemimpinan politik setelahnya diibaratkan seperti membuka kotak Pandora. Selalu ada kejutan dan kondisi yang sulit untuk diprediksi hasilnya. Secara teori transisi politik dimaknai oleh Guillermo O' Donnell dan Phillippe Schmitter sebagai "selang waktu antara rezim otoritarian dengan rezim demokratis".¹¹ Asumsi yang dibangun oleh keduanya adalah

ketika rezim otoritarian tumbang maka semua gejala yang menyertainya seharusnya lama-kelamaan akan ikut menghilang dengannya. Sayangnya transisi politik tidak melulu mengarah kepada konsolidasi demokrasi namun justru re-otoritarianisme ataupun demokrasi yang terbatas. Pola yang tidak linier antara transisi politik dengan konsolidasi demokrasi menurut beberapa literatur disebabkan oleh banyak hal.

Pertama, pada masa transisi aturan politik 'dimaknai ulang' oleh tiap entitas yang berkepentingan dalam politik. Masing-masing butuh untuk mengondisikan agar 'aturan politik' yang terbentuk menguntungkan diri dan kelompoknya sehingga mampu beradaptasi bahkan mendominasi dalam sistem politik yang baru. Selain itu, posisi yang dikejar oleh masing-masing entitas adalah berada dalam negara karena dengan berada dalam negara maka mereka memiliki akses untuk melakukan tindakan 'penyalahgunaan' wewenang kekuasaan demi kepentingan pribadi yang tentunya akan melanggar hukum yang berlaku.¹² Maka kecenderungan yang ada adalah terjadinya pembajakan elit.¹³

Kedua, demokrasi diasumsikan bisa berjalan dalam keadaan masyarakat yang modern dan

¹¹ Guillermo O'Donnell, Phillippe C. Schmitter, Laurence Whitehead, *Transisi Menuju Demokrasi*, Tinjauan Berbagai Perspektif (LP3ES: Jakarta, 1993), hlm. 6.

¹² Edward Aspinall dan Gerry van Klinken (Ed), *The State and Illegality in Indonesia*, (Jakarta: KITLV Press, 2011), hlm. 2.

¹³ Vedi R Hadiz, *Localising Power at Post Authoritarian in Indonesia: A Southeast Perspective*, (California: Stanford University Press, 2010), hlm. 28.

maju (sejahtera).¹⁴ Dalam tesis Amin Tohari dinyatakan bahwa salah satu faktor tidak berkembangnya demokrasi adalah adanya ketimpangan struktur sosial yang diakibatkan oleh timpangnya penguasaan aset agraria. Hal inilah yang membawa Amin Tohari pada satu kesimpulan bahwa demokratis tidaknya suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh hubungan antara struktur dengan suprastruktur. Amin Tohari berpendapat bahwa di dalam modus produksi agraris, penguasaan atas sumber agraria menentukan besar kecilnya kekuasaan yang dimiliki dan menentukan kemenangan serta kekalahan kontestasi kekuasaan dalam arena demokrasi. Ketika penguasaan sumber agraria timpang maka kecenderungan yang terjadi masyarakat menjadi kekurangan kecakapan untuk mengontrol elit sehingga demokrasi justru tidak banyak berarti kecuali hanya menjadi arena perebutan sumber-sumber kekayaan.¹⁵ Amin sampai pada satu kesimpulan bahwa watak demokrasi yang oligarkhis dan terfragmentasi di tingkat lokal pascaliberalisasi politik dan desentralisasi kekuasaan adalah dampak dari warisan masa lalu dalam pembentukan struktur agraria yang juga terdiferensiasi, terstratifikasi dan bersifat involutif. Struktur agraria yang demikian menurut Amin berkontribusi pula pada pembentukan kelas sosial yang terfragmentasi dan tidak terkonsolidasi.¹⁶

¹⁴ Willian R Brock, *Welfare, Democracy, and The New Deal*, (New York: Cambridge University Press, 1998). Amin Tohari, *Struktur Penguasaan Sumber Agraria dan Demokrasi Lokal*, Thesis, (Yogyakarta: Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM, 2012), hlm. 10.

¹⁵ Thohari, *op.cit.*, hlm. 10.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 10.

Tabel 3. Peta Kajian tentang Demokrasi¹⁷

Kajian	Fokus Kajian	Pengarang
Institusionalis	Menitik beratkan pada persoalan partisipasi, representasi, pemilihan umum, bentuk-bentuk institusi demokrasi.	Tornquist, <i>National Democratic Institute (NDI)</i> , <i>International Institute for Democracy and Electoral Assistance</i> (International IDEA).
Strukturalis	Demokrasi akan tumbuh manakala ada kesetaraan ekonomi dan sosial yang terbangun sehingga buruh dan orang-orang miskin memiliki daya tawar dan daya kontrol terhadap kekuasaan.	Vedi Hadiz, Amin Tohari.
Behavioralis	Demokrasi dipengaruhi sikap dan perilaku elit.	Gerry Van Klippen, Ari Dwipayana, R Siti Zuhro.

Selain Amin, penelitian serupa juga dilakukan oleh Mohammad Zulfan Tadjoeeddin pada 282 pemilukada di seluruh Indonesia pada tahun 2005-2007 membawanya pada satu kesimpulan bahwa tingkat kematangan masyarakat dalam berdemokrasi sangat dipengaruhi oleh IPM (indeks pembangunan manusia) dan modernisasi (kesejahteraan). Keduanya memberi kontribusi pada tingkat kemusuhan (konflik) pada proses pemilukada. Semakin modern masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya indeks pembangunan manusia maka masyarakat tersebut semakin matang sehingga tingkat kemusuhan (konflik) di masyarakat tersebut ketika proses pemilukada semakin rendah.¹⁸ Namun sayangnya Zulfan tidak memasukkan Depok sebagai salah satu unit analisis diantara 282 sampel wilayah yang ditelitinya. Padahal jika Zulfan mengacu pada modernisasi yang terlihat dari tingginya angka IPM maka Depok yang memiliki angka 79,20 tidak termasuk wilayah yang memiliki tingkat kemusuhan yang tinggi. Namun fakta di lapangan pemilu di Kota Depok 2005 telah terjadi konflik.

Konflik pilkada Depok dimulai ketika salah satu pasangan dari lima pasangan, yaitu Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada 11 Juli 2005 dengan menggugat Komisi Pemilihan Umum Kota Depok. Alasannya, terdapat kesalahan perhitungan suara sehingga pasangan itu dirugikan. Sebelumnya, KPU Depok mengumumkan hasil perhitungan suara pilkada 2005. Pasangan Nur Mahmudi

¹⁷ *Ibid*, hlm. 4-6 dan dilengkapi dari berbagai sumber referensi lainnya.

¹⁸ Mohammad Zulfan Tadjoeeddin, *Electoral Conflict and The Maturity of Local Democracy in Indonesia: Testing the Modernisation Hypothesis*, (University of Social Sciences, 2011)

Isma'il-Yuyun Wirasaputra meraih 232.610 suara atau 43,90 persen, disusul pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad 206.781 suara (39,03 persen), Yus Ruswandi-Soetadi Dipowongso 34.096 (6,44 persen), Abdul Wahab Abidin-Ilham Wijaya 32.481 suara (6,13 persen) dan Harun Heryana-Farkhan 23.850 (4,5 persen).¹⁹

Pada 4 Agustus 2005, Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengeluarkan putusan No 01/Pilkada/2005/PT Bandung yang mengabulkan permohonan dari pemohon dan menyatakan batal hasil perhitungan suara 6 Juli 2005 serta menetapkan jumlah perhitungan suara yang benar, yaitu suara Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad menjadi 269.551, sedangkan suara Nur Mahmudi Isma'il turun menjadi 204.828. Keputusan ini pun menganulir kemenangan pasangan Nur Mahmudi-Yuyun W dan memenangkan pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin. Atas putusan PT Jabar tersebut, Komisi Pemilihan Umum Depok menolak dan mengajukan memori Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) pada 16 Agustus 2005. Pada 8 September 2005 Mahkamah Agung mengumumkan pembentukan Majelis PK perkara sengketa Pilkada Depok dan menetapkan lima hakim agung. MA akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan PK dari KPU Depok, membatalkan putusan PT Jabar di Bandung tanggal 4 Agustus 2005, dan menolak keberatan dari permohonan Badrul Kamal-Syihabuddin ihwal pilkada Depok. Dengan putusan MA ini berarti Nur Mahmudi Isma'il-Yuyun Wirasaputra sah dan punya kekuatan hukum yang tetap sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok. Pada 3 Januari 2006, pasangan Badrul Kamal mengajukan permohonan keberatan atas putusan MA ke Mahkamah Konstitusi (MK).²⁰

Dari dua contoh ini maka tesis yang dibangun keduanya menjadi kurang pas. Struktur ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang ada tidak serta membuat praktek demokrasi menjadi hal yang tanpa cacat. Sementara narasi lain yang digaungkan oleh kaum behavioralis berpendapat bahwa peranan 'agency' atau karakter dan perilaku tokoh-tokoh kuncilah yang mewarnai setiap kebijakan strategis sehingga demokratis

¹⁹ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/09/nas16.htm>.

²⁰ Abdoel Fattah, "Konflik Pasca Pilkada: Kasus Depok," *Jurnal Politik* Vol. 1, No. 1, 2008.

tidaknya sebuah pemerintahan dan negara sangat dipengaruhi oleh tingkah polah dari para aktor atau elit yang ada.

Kajian-kajian menyangkut demokrasi yang menaruh perhatian pada sikap dan perilaku elit (behavioralis) salah satunya adalah Gerry Van Klinken yang menyatakan bahwa pasca-Orde Baru menjadi penanda redefinisi peran berbagai elit lokal di hampir seluruh wilayah Indonesia.²¹ Selain itu, ada buku Ari Dwipayana yang membandingkan aristokrasi di dua kota (Gianyar dan Surakarta) pasca-Orde Baru mirip dengan kesimpulan Gerry Van Klinken bahwa ada kebangkitan kembali atau minimal daya survivalitas kelompok aristokrasi dalam sistem politik baru melalui berbagai cara.²² Namun, perlu dicatat bahwa tingkah polah yang dilakukan elit adalah gambaran respon mereka terhadap situasi dan struktur yang ada sehingga peletakan demokrasi dalam perspektif elit juga tidak bisa menafikan posisi dan bangunan struktur yang ada dimana demokrasi itu akan dibangun.²³

Sedikit kajian politik lokal yang menggunakan pendekatan behavioral dengan metodologi etnografi adalah Y Argo Twikromo dan Jacqueline Veil. Buku Y Argo Twikromo memfokuskan studinya pada peran elit lokal dalam hubungannya antara negara dengan komunitas lokal. Elit lokal berusaha untuk memelihara penguasaannya atas sumber daya negara maupun masyarakat, mendapatkan keuntungan maksimal dari keduanya. Studi ini menaruh perhatiannya pada taktik dan strategi yang dilakukan oleh elit lokal di ujung timur Sumba untuk memelihara penguasaannya atas berbagai sumber daya dan keseimbangan dengan aktor lain dalam mencapai tujuan mereka.²⁴

²¹ Henley, Davidson, Moniaga (Eds.), *Adat dalam Politik Indonesia*, (Jakarta: KITLV, 2010), hlm. 50.

²² AAGN Ari Dwipayana, *Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*, (Yogyakarta: IRE Press, 2004), hlm 7.

²³ Septi Satriani (Ed), *Dinamika Peran Elit Lokal dalam Pilkada Bima 2010*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015).

²⁴ Y Argo Twikromo, *The Local Elit and The Appropriation of Modernity: A Case in East Sumba Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm 23.

Di sini Argo Twikromo menjelaskan bahwa pada umumnya, daerah yang berada di luar Jawa memandang negara seperti layaknya benda asing yang jauh letaknya. Berada jauh dari pusat kekuasaan negara, Argo Twikromo menjelaskan bahwa daerah-daerah ini memilih untuk hidup dengan menggunakan tradisi dan lingkungan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Argo Twikromo menjelaskan bahwa mereka cenderung menghindari kontak langsung dengan negara dan berbagai kebijakan yang dimilikinya. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh elit lokal melalui berbagai strategi kreatif yang berakar dari tradisi mereka dalam kerangka melibatkan diri atau menolak kebijakan pemerintahan nasional.²⁵

Peran yang diemban elit lokal ini, menurut Argo Twikromo hanya bisa dijelaskan bahwa mereka memilih menjadi perantara antara komunitas lokal dan negara. Menjadi perantara, elit lokal memiliki kesempatan untuk memanipulasi dan menggunakan pola maupun simbol kebudayaan dalam kerangka menciptakan komunitas masyarakat yang sah. Menurut Argo Twikromo, melalui posisi dan peran ini, mereka dapat menuai keuntungan politik dan ekonomi. Sebagai tambahan, studi ini juga memiliki argument yang kuat bahwa meski isu desentralisasi dan otonomi daerah muncul namun ata (budak) masih mematuhi dan mengikuti kekuasaan dan kewenangan elit.²⁶

Dalam karya Jacqueline AC Vel yang berjudul *Uma Politics*, Jacqueline ingin menggambarkan bagaimana seorang kandidat mencoba membangun 'brand image' tentang dirinya. Karya ini mampu memberi gambaran bagaimana Umbu Sappi Pateduk menanamkan harapan kepada masyarakat akan kesejahteraan mereka jika nantinya dia terpilih dalam pemilukada Sumba Barat 2005 dengan menggunakan modal kulturalnya. Menurut pendapat Jacqueline AC Vel konsepsi Sumba mengenai kekuasaan telah melampaui dikotomi antara tradisional dan barat. Mereka mengadopsi konsep kekuasaan 'barat' yang memandang kekuasaan sebagai kekuatan yang berasal dari berbagai sumber. Orang Sumba telah menggabungkan berbagai elemen

yang konsekuensinya adalah bahwa orang yang ingin menjadi pemimpin yang paling sah, kuat dan karismatik harus mengontrol berbagai jenis sumber daya sebisa mungkin dalam jumlah besar. Jacqueline menambahkan bahwa kekuasaan dapat dipahami sebagai akumulasi modal, kombinasi modal budaya, sosial dan ekonomi tradisional dan modern.²⁷

Disini Jacqueline AC Vel ini memperlihatkan bahwa tradisi adalah modal yang masih relevan digunakan dalam kepemimpinan politik di Sumba. Hal yang sama disampaikan oleh Y Argo Twikromo bahwa konsep tentang asal usul, garis keturunan masih menjadi faktor utama dalam menentukan derajat atau posisi seseorang dalam masyarakat.²⁸ Praktek yang dilakukan oleh Umbu Bintang jika dilihat dengan perspektif karya Y Argo Twikromo bahwa orasi maupun makam leluhur menjadi semacam bukti yang memperkuat klaim yang dilakukan oleh 'elit' untuk memasukkan dirinya sebagai keturunan dari kelas yang 'utama'. Praktek di atas adalah bagian dari implementasi 'sejarah oral' mengenai asal usul dan nenek moyang Umbu Bintang. Keberadaan artefak makam memperkuat klaim atas klasifikasi sosial, peringkat, kekuasaan dan otoritas dalam hubungannya dengan orang atau klan lain. Sayangnya Umbu Bintang kalah dalam pemilukada 2005 meski dia mampu meraih 75% suara di wilayahnya. Umbu Bintang hanya mampu meraih 19% suara dikalahkan oleh pasangan Drs. Julianus Pote Leba MSi-dr Kornelis Kodi Mete yg berhasil mengantongi 32% suara. Drs. Julianus Pote Leba MSi adalah bupati *incumbent* periode sebelumnya dan dr Kornelis Kodi Mete adalah kepala rumah sakit umum di Kabupaten Sumba Barat.

Studi lain mengenai elit lokal dilakukan oleh Syarif Hidayat yang memfokuskan pada dinamika politik lokal di Banten. Disini Syarif ingin memperlihatkan relasi antara pengusaha dengan penguasa dalam perebutan akses sumber daya yang ada di sana. Intinya Syarif ingin

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Jacqueline AC Vel, *Uma Politics: An Ethnography or Democratization of West Sumba Indonesia 1986-2006*, (Leiden: KITLV, 2008), hlm. 70.

²⁸ Y Argo Twikromo, *The Local Elit and The Appropriation of Modernity: A Case in East Sumba Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 64.

mengatakan bahwa Jawa sebagai ‘*shadow state*’ mampu mempengaruhi jalannya pemerintahan di Propinsi Banten.²⁹

Dalam literatur yang sama John M Mac Dougall menulis tentang kriminalitas dan ekonomi politik keamanan di Lombok. Disini Dougall menyinggung pula bagaimana posisi Tuan Guru dalam politik nasional pada tahun 1971 serta kompensasi yang didapatkan oleh Tuan Guru ketika membantu kemenangan Golkar pada pemilu tersebut. Tuan Guru Nahdlatul Wathan (NW) mendapat kompensasi bantuan militer dan pejabat pemerintah dalam melakukan dakwah khususnya di Lombok Utara (wet semokan/Islam wetu telu).³⁰ Penelitian lain yang dilakukan oleh LIPI juga memperlihatkan bahwa pasca-Reformasi membuka peluang peran elit di tingkat lokal khususnya Tuan Guru mengalami pergeseran peran dari ranah kultural ke politik pemerintahan.³¹ Selain itu, kajian LIPI tentang elit juga memperlihatkan bahwa paradoks demokrasi di tingkat lokal terjadi karena polah tingkah elit yang membajak jalannya demokrasi dan pemerintahan.³²

Narasi lain yang coba dipetakan oleh Amin Tohari tentang demokrasi adalah bahwa kajian-kajian selama ini yang menaruh perhatian kepada demokrasi pasca-Orde Baru lebih banyak menitikberatkan pada persoalan partisipasi, representasi, pemilihan langsung dan bentuk-bentuk institusi demokrasi di tingkat lokal. Selain itu, kajian demokrasi yang menitikberatkan pada kelembagaan berpendapat bahwa dengan kelembagaan yang baik maka demokrasi akan tumbuh dengan sendirinya. Kelembagaan yang dimaksud disini menyangkut kebebasan sipil dan politik.³³ Sayangnya Amin hanya memetakan saja

²⁹ Syarif Hidayat, “Shadow State...?, Bisnis dan Politik di Provinsi Banten”, (Jakarta: KITLV-YOI, 2007), hlm 265-303 dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (Ed), *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: KITLV-YOI, 2007).

³⁰ John M Mac Dougall, “Kriminalitas dan Ekonomi Politik Keamanan di Lombok”, (Jakarta: KITLV-YOI, 2007), hlm 375-405 dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (Ed), *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: KITLV-YOI, 2007).

³¹ Irine Hiraswari Gayatri (Ed), *Dinamika Peran Toan Guru Pasca Orde Baru di Lombok Timur*, (Jakarta: LIPI Press, 2009).

³² Septi Satriani (Ed), *Dinamika Peran Elit Lokal dalam Pilkada Bima 2010*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015).

³³ Tohari, *op.cit.*

tanpa membahas sampai sejauh mana bekerjanya masing-masing kajian yang selama ini menaruh perhatian pada persoalan-persoalan ini. Hal inilah yang akan coba penulis lengkapi.

Berbicara mengenai partisipasi, teori yang dibangun oleh para ilmuwan yang menaruh perhatian pada demokrasi menyatakan bahwa tingkat partisipasi dapat digunakan untuk mengukur apakah sistem politik di negara tersebut demokratis atau tidak.³⁴ Asumsinya tingginya tingkat partisipasi warga mencerminkan bahwa sistem politik di negara yang bersangkutan memberi ruang atau hak kepada warga masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan negara. Maka pada jaman Soeharto ketika menerapkan sistem monoloyalitas tunggal kepada PNS dan kebijakan *floating mass* bagi parpol membuat rezim ini masuk dalam kategori yang tidak demokratis.³⁵ Begitu juga dengan tingkat representasi. Ketika jaman Soeharto diterapkan fusi partai menjadi tiga dengan sistem perwakilan yang ada membuat tingkat representasi warga jauh lebih ‘rendah’ dibandingkan sistem perwakilan saat ini yang membuka peluang yang luas bagi warga untuk ikut memilih wakil-wakilnya.

Menyangkut soal transparansi untuk kadar tertentu pelaksanaan pemilu di Indonesia saat ini jauh lebih terbuka. Sebagai contoh pelaksanaan pemilu dari awal hingga akhir bisa dipantau oleh berbagai elemen dari dalam maupun luar baik swasta maupun negara. Keberadaan teknologi yang tercermin dari ketersediaan Informasi dan Teknologi atau IT di ruang kontrol Komisi Pemilihan Umum pusat juga menjadi salah satu wahana pengawasan jalannya penghitungan suara. Belum lagi keterlibatan awak media baik elektronik maupun cetak yang tersebar di seluruh wilayah hadir sebagai lembaga pengawas yang berada di luar negara.

Jika semua parameter yang diidentifikasi oleh Amin telah terpenuhi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia saat ini mengapa hasilnya seolah menjauh dari praktek demokrasi itu

³⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo Media Utama), hlm. 142.

³⁵ Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999); Ikrar Nusa Bhakti, *Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 65.

sendiri. Tingkat elektabilitas yang tinggi yang tercermin dalam suara yang tinggi diberikan warga kepada Ferry ternyata tidak menjamin pemerintahan yang dibangun menjadi demokratis. Untuk itu penulis akan mencoba mengaplikasikan konsep demokrasi ala Charles Tilly yang melihat kesesuaian perilaku negara dengan tuntutan warga sebagai parameter untuk melihat demokratis tidaknya rezim yang dibangun oleh Bupati Ferry.

Sejak awal Charles Tilly berpendapat bahwa susah mencari definisi yang pas untuk demokrasi. Dalam beberapa fakta ada negara yang dikategorikan demokratis tetapi dalam prakteknya justru sangat menjauh dari demokrasi itu sendiri. Di sini Charles Tilly mencontohkan negara Kazakhstan.³⁶ Di sisi lain ada negara dikategorikan tidak demokratis tetapi justru dalam prakteknya memenuhi nilai-nilai demokratis. Di sini Charles Tilly mencontohkan negara Jamaica.³⁷ Menurut Charles Tilly penilaian terhadap demokratis tidaknya sebuah rezim diukur dari sejauh mana berperilaku negara sesuai dengan tuntutan yang diungkapkan warga negaranya sehingga ukuran demokratisasi dan de-demokratisasi dilihat pada sejauh mana kesesuaian bertambah atau berkurang. Dalam perspektif yang sederhana, sebuah rezim demokratis menurut Charles Tilly adalah jika pada tingkat hubungan politik antara negara dengan warganya ada pada posisi yang luas, setara, aman terlindungi dan pada posisi konsultasi yang saling mengikat. Maka menurut Charles Tilly rezim yang demokratis jika hubungan yang dibangun antara negara dengan warga tidak terbatas atau luas, lebih sejajar, lebih terlindungi dan ikatan untuk konsultasi juga lebih kuat. Sementara yang tidak demokratis jika hubungan antara negara dengan warga itu dangkal, kurang terlindungi, kurang sejajar posisinya dan hubungannya konsultasinya juga tidak erat.³⁸

³⁶ Charles Tilly, *Democracy*, (USA: Cambridge University, 2007), hlm. 2-3.

³⁷ *Ibid*, hlm. 5.

³⁸ *Ibid*, hlm. 13-14.

Charles Tilly kemudian menjelaskan bahwa terminologi luas, setara, aman terlindungi atau perlindungan dan saling mengikat terkait pada empat bagian dimensi yang bebas di antara berbagai rezim yang ada. Deskripsi kasar dari empat dimensi ini menurut Charles Tilly adalah sebagai berikut:³⁹

1. **Keluasan:** Dari hanya segmen kecil dari populasi yang mampu menikmati hak-hak yang luas hingga pada inklusi politik bagi semua orang yang berada di bawah yurisdiksi negara (pada satu titik, setiap rumah tangga memiliki hubungan tersendiri dengan negara, tetapi hanya beberapa rumah tangga memiliki hak penuh kewarganegaraan, di sisi lain semua warga negara dewasa termasuk dalam kategori yang sama dalam hal kewarganegaraan).
2. **Kesetaraan:** dari ketimpangan besar di antara dan di dalam kategori warga hingga kesetaraan yang luas di kedua hal (pada satu titik yang ekstrim, kategori etnis jatuh ke dalam urutan peringkat yang jelas dengan hak dan kewajiban yang tidak setara, tetapi di sisi lain, etnis tidak memiliki hubungan signifikan dengan hak atau kewajiban politik dan sebagian besar hak sama berlaku antara warga kelahiran asli dan naturalisasi).
3. **Perlindungan:** dari sedikit hingga perlindungan yang luas terhadap tindakan sewenang-wenang negara (pada satu titik, agen negara terus menerus menggunakan kekuasaan mereka untuk menghukum musuh pribadi, dan menghargai teman-teman mereka, di lain pihak semua warga menikmati proses yang terlihat oleh umum tersebut).
4. **Konsultasi saling mengikat:** dari konsultasi yang tidak mengikat dan atau sangat asimetris hingga pada konsultasi yang saling mengikat (pada titik yang ekstrim, pencari keuntungan negara harus menyuap, membujuk,

³⁹ *Ibid*, hlm. 14-15.

mengancam, atau menggunakan pengaruh pihak ketiga untuk mendapatkan segalanya; di lain sisi, agen negara memiliki kewenangan yang jelas, kewajiban hukum untuk memberikan manfaat berdasarkan kategori penerima)

Lebih lanjut, Charles Tilly mengatakan bahwa kapasitas negara dibutuhkan dalam pelaksanaan demokrasi karena bagi Charles Tilly tidak ada demokrasi yang bisa berjalan jika negara kekurangan kapasitas untuk mensupervisi pembuatan kebijakan yang demokratis serta menerapkannya dalam praktek keseharian bernegara.⁴⁰ Kapasitas negara merujuk pada sejauh mana intervensi negara dalam sumber daya yang ada diantara sumber daya nonnegara, kegiatan, dan koneksi antar personal sebaik hubungan dalam distribusi diantara mereka. Intinya menurut Charles Tilly dalam rezim yang memiliki kapasitas yang tinggi segala aksi yang dilakukan negara akan berpengaruh pada sumber daya, aktivitas maupun hubungan interpersonal secara signifikan. Begitu juga sebaliknya dalam kapasitas negara yang rendah, apapun yang negara lakukan tidak akan berpengaruh secara signifikan, jikalau berpengaruh hanya pada derajat yang rendah meskipun atau bagaimanapun mereka berusaha untuk merubahnya.⁴¹

Charles Tilly kemudian memetakan karakter rezim politik publik didasarkan pada tinggi rendahnya kapasitas negara dan tinggi rendahnya demokrasi. Disini Charles Tilly menggambarkan dalam sebuah diagram garis yang bergerak dari angka 0 (nol) hingga 1 (satu) yang membentuk empat kuadran dengan karakter seperti di bawah ini⁴²:

1. **Kapasitas Tinggi Tidak Demokratis** yang ditandai oleh suara publik porsinya sedikit kecuali ditimbulkan oleh negara, keterlibatan yang luas dari pasukan keamanan negara dalam politik, perubahan rezim baik

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 15.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 16.

⁴² *Ibid*, hlm. 20-21.

melalui perjuangan dari atas maupun pemberontakan massa dari bawah

2. **Kapasitas Rendah Tidak Demokratis** yang ditandai oleh panglima perang, blok etnis dan mobilisasi agama, perjuangan kekerasan sering terjadi termasuk perang sipil, beberapa aktor politik termasuk para penjahat menyebarkan kekuatan yang mematikan
3. **Kapasitas Rendah Demokratis** yang digambarkan Tilly seperti rezim kapasitas tinggi demokrasi, gerakan sosial sering, kegiatan kelompok kepentingan dan mobilisasi partai politik ditambah konsultasi formal (termasuk pemilihan kompetitif) kegiatan politik sangat tinggi tetapi pemantauan keadaan kurang efektif, keterlibatan yang lebih tinggi dari pelaku legal dan setengah ilegal dalam politik lebih tinggi
4. **Kapasitas Tinggi Demokratis** yang ditandai oleh gerakan sosial sering, kegiatan kelompok kepentingan dan mobilisasi partai politik, konsultasi formal (termasuk pemilihan kompetitif) sebagai titik tinggi aktivitas politik, pemantauan negara atas politik publik dikombinasikan dengan tingkat kekuasaan politik yang relatif rendah.

Dari kuadran yang digambarkan oleh Charles Tilly dapat disimpulkan bahwa demokratisasi (proses demokrasi) dan de-demokratisasi (proses menjadi tidak demokrasi) adalah gambaran interaksi dalam sisi perubahan kapasitas negara. Selanjutnya Charles Tilly mengatur penjelasan utama demokratisasi dan de-demokratisasi ke dalam tiga cluster pusat perubahan⁴³:

1. Meningkatkan dan menurunkan integrasi antara jaringan kepercayaan interpersonal seperti misalnya kekerabatan, keanggotaan agama, dan hubungan dalam perdagangan dan masyarakat politik
2. Meningkatkan dan penurunan isolasi politik publik dari ketidaksetaraan

⁴³ *Ibid*, hlm. 23.

kategoris utama seperti misalnya jenis kelamin, ras, etnis, agama, kelas, kasta sekitar warga yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka.

3. Meningkatkan dan menurunnya otonomi pusat kekuatan utama terutama yang memegang cara-cara koersif signifikan seperti *warlords*, rantai patron-klien, tentara, dan lembaga keagamaan yang berkaitan dengan politik publik.

Penjelasan Charles Tilly mengenai praktek demokrasi jika dikaitkan dengan kesesuaian perilaku negara dengan tuntutan yang diungkapkan warga negaranya memberi pemahaman kepada penulis bahwa pada satu titik kapasitas negara dalam mewujudkan demokrasi tidak lepas dari bagaimana kemampuan negara dalam mewujudkan pemberian hak dan kesetaraan bagi warga negara, perlindungan, penghargaan terhadap warga yang terlihat dari adanya konsultasi yang dilakukan oleh negara terhadap warganya di atas jenis kelamin, ras, etnis, agama kelas maupun kasta.

Praktek Demokrasi di Bima dalam Perspektif Charles Tilly

Setelah mencoba mengidentifikasi berbagai teori yang ada mengenai demokrasi, penulis akan mencoba membunyikan data lapangan dalam konflik Lambu dengan menggunakan perspektif Charles Tilly. Pilihan perspektif lebih kepada keinginan penulis untuk mengisi kekosongan tulisan yang menggunakan perspektif ini. Selain itu perspektif yang menggunakan ikatan primordial seperti yang dilakukan oleh LIPI atas data yang sama⁴⁴ cenderung menempatkan warga sebagai objek yang dipersalahkan. Dengan menggunakan perspektif Charles Tilly yang melihat hubungan negara dengan warga, penulis berpendapat bahwa posisi warga disetarakan dengan negara sehingga interaksi diantara keduanya akan bisa dijadikan parameter untuk mengukur derajat demokrasi di Bima terutama dalam kasus konflik di Lambu. Kajian selama ini selalu hanya sepihak melihat perilaku negara atau aktor dan menempatkan warga sebagai objek

⁴⁴ Septi Satriani (Ed), *Dinamika Peran Elit Lokal dalam Pilkada Bima 2010*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015).

yang tidak memiliki peran, jikalau ada hanya terbatas atau memiliki pengaruh secara negatif terhadap proses atau praktek demokrasi karena rendahnya tingkat pengetahuan yang dimilikinya (pemilih tradisional).

Dalam tulisannya Amin Tohari berpendapat bahwa di dalam modus produksi agraris, penguasaan atas sumber agraria menentukan besar kecilnya kekuasaan yang dimiliki dan menentukan kemenangan serta kekalahan kontestasi kekuasaan dalam arena demokrasi. Ketika penguasaan sumber agraria timpang maka kecenderungan yang terjadi masyarakat menjadi kurang kecakapan untuk mengontrol elit sehingga demokrasi justru tidak banyak berarti kecuali hanya menjadi arena perebutan sumber-sumber kekayaan.⁴⁵ Amin pada satu kesimpulan bahwa watak demokrasi yang oligarkis dan terfragmentasi di tingkat lokal pascaliberalisasi politik dan desentralisasi kekuasaan adalah dampak dari warisan masa lalu dalam pembentukan struktur agraria yang juga terdiferensiasi, terstratifikasi dan bersifat involutif. Struktur agraria yang demikian menurut Amin berkontribusi pula pada pembentukan kelas sosial yang terfragmentasi dan tidak terkonsolidasi.⁴⁶

Secara fakta, watak elit di Bima memang sangat oligarkis. Politik kekerabatan dan kedekatan menjadi bagian dari operasi kekuasaan masing-masing elit lokal untuk bersaing dalam kompetisi meraih kemenangan politik. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber⁴⁷, minimal ada empat keluarga yang boleh dibilang menonjol di Kabupaten Bima. H. Ahmad, Putra Abdul Kahir, H. Abidin dan H. Adenan.⁴⁸ Dua nama terakhir adalah kakak beradik yang menguasai peternakan dan jasa konstruksi bangunan. Putra Abdul Kahir memiliki

⁴⁵ Thohari, *op.cit.*, hlm. 10.

⁴⁶ Tohari, *op.cit.*

⁴⁷ Wawancara dengan pemimpin redaksi media cetak di Kabupaten Bima, anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi PKS, sekretariat KPUD Kabupate Bima, pengurus harian Gapensi Kabupaten Bima.

⁴⁸ Penulis akui bahwa minimnya data membuat penulis kesulitan untuk melengkapi detail-detailnya. Mungkin melalui penelitian lebih lanjut nama-nama yang boleh dibilang menonjol ini bisa dikaji lebih lengkap.

empat orang anak satu di antaranya meninggal karena kecelakaan.⁴⁹ Ketiga yang lainnya adalah Ferry Zulkarnain yang menjabat menjadi Bupati Kabupaten Bima 2005-2010 dan 2010-2015,⁵⁰ Fera menjabat menjadi Ketua DPRD Kota Bima dan Ade yang duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2009–2014. Data terakhir yang diperoleh penulis, istri mendiang Bupati Ferry, Indah Dhamayanti Putri bahkan mampu mengalahkan petahana dalam pilkada Kota Bima 2015.⁵¹

Haji Adenan memiliki anak H Arifin yang merupakan orang tua dari Ady Mahyudi. Ia adalah salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Bima periode 2009-2014 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ady Mahyudi kemudian menikah dengan salah satu kerabat dari Haji Abidin.⁵² Haji Abidin memiliki beberapa anak dari dua istri antara lain H. Qurais, H. Arrahman, H. Abidin, Hj Siti Sundari, Mawarni, dan Andang Abidin. H Qurais bin Abidin dan H Arrahman bin Abidin adalah Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima periode 2008–2013. H Qurais bin Abidin menjadi Walikota Kota Bima pada tahun 2010 ketika Drs. H M Nur A Latif Walikota yang menjadi pasangannya pada pemilukada 2008 wafat pada 6 Maret 2010. Drs. H M Nur A Latif pernah menjabat menjadi Walikota Bima pada tahun 2003–2005 berpasangan dengan H Umar Abubakar Husen.⁵³

Hj Siti Sundari anak dari H Abidin yang merupakan pengusaha jasa perhotelan di Kabupaten Bima menikah dengan salah satu

anak keluarga Haris, yaitu H. Abd Rahim Haris. Dia merupakan mantan Ketua PBB cabang Kab. Bima, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima serta Ketua Yayasan Islam yang mengelola tanah wakaf milik kesultanan yang merupakan kelanjutan dari Makhamatul Syariah atau lembaga Syara' pada masa kesultanan. Terakhir Andang Abidin adalah ketua tim sukses dari pasangan Zaenul Arifin mantan Bupati Kabupaten Bima 2003–2005 dengan Usman AK mantan wakil Bupati Bima 2005 yang berpasangan dengan Ferry Zulkarnain. Hubungan yang dijalin antara keluarga H Abidin yang bergerak dalam jasa konstruksi bangunan di Kabupaten Bima dengan keluarga H Adenan melalui Ady Mahyudi, anggota DPRD Kabupaten Bima sekaligus Ketua Gapensi Kabupaten Bima, disinyalir sebagai bagian untuk membentuk blok tandingan jasa konstruksi yang dibangun oleh keluarga Ferry dan kroninya.⁵⁴

Di satu titik tesis Amin terbukti di Bima dalam hal watak elit yang oligarkis. Namun di sisi lain tesis ini tidak bisa diterapkan terutama dalam kaitan dengan ketiadaan kontrol dari masyarakat. Justru fragmentasi yang ada membuat faksi yang ada bisa saling mengontrol satu sama lain dan elit yang ada tidak bisa berkuasa secara dominan dalam politik lokal di Bima.⁵⁵ Termasuk dalam kasus konflik tambang di Lambu. Dari data kronologis yang penulis paparkan di atas, masyarakat memiliki posisi yang boleh dibilang cukup 'kuat' dalam hal berhadapan dengan negara atau Bupati Ferry. Padahal jika dikaitkan dengan persoalan penguasaan sumber daya agraria atau kaitan dengan sejahtera dan tidak sejahtera, memang terjadi ketimpangan di Bima. Namun ini tidak serta membuat masyarakat tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Apalagi jumlah keluarga miskin di Lambu mencapai 5.745 jiwa dari 8.546 KK yang terdaftar. Ini berarti di Kecamatan Lambu dihuni oleh 67,22% penduduk miskin. Hal ini berbeda dengan Kecamatan Parado yang memiliki warga miskin sejumlah 1.678 dari 2.483 KK yang terdaftar atau sekitar 67,58%. Dibanding dengan Kecamatan Lambu, Kecamatan Parado

⁴⁹ Wawancara ketua komunitas generasi muda 'terdidik' di Kabupaten Bima, 27 April 2014. Berdasarkan penuturan narasumber kecelakaan diindikasikan karena yang bersangkutan sedang mabuk berat padahal sebenarnya di tangan beliaulah tadinya tahta kesultanan akan diwariskan hingga muncul rumor bahwa kematian sang kakak adalah bagian dari skenario perebutan tahta meski rumor tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya hingga penelitian ini dilakukan.

⁵⁰ Bupati ini meninggal pada 26 Desember 2013, <http://kahaba.net/berita-bima/13880/bupati-bima-dipanggil-sang-khalik.html>, diakses pada tanggal 27 Desember 2015.

⁵¹ <http://pilkada-serentak-2015.liputan6.com/read/2386076/pilkada-kabupaten-bima-srikandi-ini-tumbang-petahana>, diakses pada tanggal 27 Desember 2015.

⁵² Septi Satriani (Ed), *Dinamika Peran Elit Lokal pada Pemilu Bima 2010*, (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2015).

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Septi Satriani (Ed), *Dinamika Peran Elit Lokal pada Pemilu Bima 2010*, (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2015).

⁵⁵ *Ibid.*

relatif lebih 'sejahtera' dibanding Kecamatan Lambu. Namun persoalan kontrol terhadap negara (Bupati Ferry), masyarakat Lambu jauh lebih memiliki posisi tawar dibanding dengan masyarakat Parado. Padahal kedua wilayah ini sama-sama menjadi 'korban' terbitnya SK Nomor 188/45/357/004/2010. Jika mengacu pada tabel kronologis di atas intensitas masyarakat Kecamatan Lambu untuk melakukan dialog dengan negara jauh lebih banyak (delapan kali) dibanding masyarakat Parado yang hanya sekali meski juga berujung bentrok.

Sementara itu Charles Tilly menawarkan untuk mengukur praktek demokrasi dengan melihat hubungan antara negara dalam hal ini Bupati Ferry dengan warga Lambu. Dalam derajat tertentu praktek demokrasi menurut Charles Tilly bisa dilihat pada sejauh mana kapasitas negara mampu membuka sekat diantara negara dengan warganya dalam hal kesetaraan hak, perlindungan dan penghargaan terhadap warga yang tercermin dalam pelibatan warga dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, kapasitas disini yaitu dalam hal penggunaan kekerasan oleh negara sehingga derajat demokratis tidaknya ada kaitan dengan masif tidaknya penggunaan kekerasan dalam merespon tuntutan warga.⁵⁷

Tabel 4. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I, II, III dan III+ Dirinci Menurut Kecamatan Hasil Pendataan tahun 2009⁵⁶

No	Kecamatan	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III+	Jumlah Kel Miskin (Prasejahtera + Sejahtera I)	Jumlah KK Yang Terdaftar	Prosentase dalam %
1	Tambora	1392	384	211	15		1776	2202	80,65
2	Sanggar	1033	645	610	710		1678	3026	55,45
3	Madapangga	3710	1957	2439	1230		5667	7747	73,15
4	Bolo	3710	3378	2678	1693	12	7088	11471	61,79
5	Donggo	1873	1541	643			3414	4059	84,11
6	Belo	1767	1531	1623		1924	3298	6845	48,18
7	Monta	4009	2188	1758	1124	32	6197	9111	68,02
8	Woha	1303	3932	5566	418	7	5235	11226	46,63
9	Sape	4118	2838	2599	3814	3	6956	13372	52,02
10	Lambu	3508	2237	1910	843	48	5745	8546	67,22
11	Wawo	995	1036	1808	461		2031	4300	47,23
12	Langgudu	3839	1616	876	715		5455	7046	77,41
13	Wera	1689	2838	2466	450		4527	7637	59,28
14	Ambalawi	1934	3032	1328	248		4966	6542	75,09
15	Soromandi	1341	1517	763	90		2858	3911	73,07
16	Parado	1055	623	572	233		1678	2483	67,58
17	Palibelo	1012	2079	2596	105		3091	6692	46,19
18	Lambitu	204	545	300	39		749	1288	58,15
		38492	33917	30746	12188	2026			

Sumber: Kabupaten Bima Dalam Angka 2010

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 57.

⁵⁷ Tilly, *op.cit.*, hlm. 21-22.

Dalam perspektif Charles Tilly hubungan negara atau Bupati Ferry dengan warga Lambu jika diturunkan dalam indikator atau parameter yang ada adalah sebagai berikut:

1. Keluasan

Charles Tilly mengatakan untuk melihat persoalan keluasan dapat dilihat sampai sejauh mana orang yang berada di bawah yuridiksi negara mampu menikmati hak-hak secara luas. Dalam kasus Lambu hak bersuara, berpendapat dan mengemukakan pendapat yang dilindungi dan diakui oleh konstitusi tidak sepenuhnya dimiliki oleh warga Lambu. Meski dalam derajat tertentu mereka bisa bersuara lantang menolak kasus Lambu namun respon yang dikemukakan oleh negara tidak menggambarkan adanya keluasan hak tersebut. Masyarakat merasa takut dan tertekan karena hak mereka untuk melindungi wilayahnya harus dihadapkan pada perbedaan kepentingan dan pemaknaan dari negara. Warga masyarakat Lambu perlu memperjuangkan penolakan usaha tambang di wilayahnya mengingat luas lokasi yang begitu besar dan ancaman bahaya lingkungan yang tidak sebanding dengan jaminan kesejahteraan atas proses penambangan yang akan terjadi di Kecamatan Lambu. Namun sikap represif negara yang justru datang merespons tuntutan warga.

2. Kesetaraan

Charles Tilly berpendapat bahwa kesetaraan dapat dilihat dari ketiadaannya ketimpangan besar di antara dan di dalam kategori warga dimana perbedaan etnis tidak memiliki hubungan signifikan dengan hak atau kewajiban politik dan sebagian besar hak sama berlaku antara warga kelahiran asli dan naturalisasi. Khusus parameter ini memang tidak berlaku dalam hubungan dengan persoalan etnisitas atau antara warga asli dan pendatang karena mayoritas penduduk di Kabupaten bahkan Kota Bima termasuk Lambu didominasi oleh warga beretnis Mbojo. Hanya sedikit yang berasal dari Bugis. Namun dalam persoalan konflik Lambu kesetaraan tidak ditemui dalam derajat hubungan antara negara dengan warga. Disini seolah-olah negara berhadapan dengan warga dalam posisi yang subordinat. Kekuasaan yang dimiliki

negara dalam monopoli kekerasan digunakan untuk menjawab tuntutan warga. Dalam dasar-dasar ilmu politik yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo,⁵⁸ Negara adalah institusi yang memonopoli penggunaan kekerasan. Namun dalam pandangan penulis, penggunaan kekerasan oleh negara dalam kasus Lambu lebih disebabkan oleh apa yang disebut Charles Tilly sebagai keterbatasan kapasitas. Ketika negara kurang mampu merespon tuntutan warga maka kekerasan menjadi salah satu solusi yang tersedia. Usaha persuasif hingga represif tetap tidak mampu merubah tuntutan warga hingga negara atau Bupati Ferry mencabut sementara Surat Keputusan Ijin Usaha Pertambangan Nomor 188/45/357/004/2010.

3. Perlindungan

Seperti dijelaskan oleh Charles Tilly perlindungan ini mengacu pada luas tidaknya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang negara. Tindakan kesewenang-wenangan ini tidak saja menyangkut tindakan kekerasan tetapi menyangkut berbagai tindakan yang berdampak pada kehidupan warga. Dalam kasus Lambu, pemerintah secara sepihak menyetujui dan mengeluarkan ijin usaha penambangan di wilayah yang berdampak pada masa depan masyarakat yang ada di sekitar ijin tambang tersebut diberikan. Dengan perspektif Charles Tilly, negara gagal memberi perlindungan kepada warga malah dalam kasus ini negara justru melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga dengan merespon tuntutan warga justru melalui senjata dan kekerasan lainnya.

4. Konsultasi saling mengikat

Dari konsep yang dikemukakan Charles Tilly, kasus Lambu ini menggambarkan adanya konsultasi yang tidak mengikat dan atau sangat asimetris. Selain tidak melewati konsultasi dengan warga, Surat Keputusan ini dianggap menyalahi prosedur. Surat Keputusan Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, ST yang bernomor 188/45/375/004/2010, diduga cacat hukum karena bertentangan dengan aturan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 3 Tahun

⁵⁸ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo Media Utama).

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nusa Tenggara Barat. Apalagi informasi yang dihimpun Suara NTB, SK 188/45/375/004/2010 tersebut ternyata dikeluarkan pada tanggal 28 April 2010 sehingga SK ini harus mendasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara (Minerba). Berdasarkan peraturan tersebut seharusnya ijin usaha tambang untuk eksplorasi harus melalui proses lelang tetapi dalam kenyataannya proses tersebut tidak dilalui.

PT Sumber Mineral Nusantara adalah perusahaan asal Australia yang ternyata pemiliknya adalah George Tahija. Di Australia sosok almarhum Julius Tahija yang merupakan ayah George Tahija sangat dihormati warga negeri Kangguru itu karena peristiwa heroik pada masa Perang Dunia II. Bahkan Julius Tahija mendapat penghargaan tertinggi Pemerintah Belanda yaitu Ridders der Militaire Willems Orde yang merupakan penghargaan setingkat Victoria Cross di Inggris atau Congressional Medal of Honor Amerika Serikat. Julius Tahija juga merupakan salah satu pendiri PT Freeport Indonesia (PTFI) sehingga mendapat posisi komisaris kehormatan di salah perusahaan tambang emas besar di dunia itu. Saat ini George Tahija tercatat sebagai salah satu komisaris PTFI. Pada awal berdirinya PTFI, segala kebutuhan barang dan jasa terkait operasional perusahaan lebih banyak diambil dari Australia ketimbang membeli dari Surabaya atau Jakarta. Di sini peran Julius Tahija sangat penting dalam memberikan akses pejabat pemerintah Australia kepada PTFI untuk berbagai kebutuhan dan fasilitas perusahaan.⁵⁹ Konsultasi yang asimetris terutama dengan warga menyebabkan warga merasa tidak terikat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara atau Bupati Ferry ini. Mungkin akan berbeda jika kebijakan tentang ijin usaha tambang ini melewati prosedur yang benar dengan melibatkan konsultasi terhadap warga. Selain itu tidak dilibatkannya warga dalam keluarnya keputusan ijin usaha pertambangan kepada PT SMN ini adalah gambaran minimnya kapasitas negara dalam kaitannya dengan kuatnya otonomi Bupati Ferry yang lebih mengedepankan kepentingan orang-orang yang memiliki kedekatan dengannya.

⁵⁹ <http://petapolitik.com/news/gurita-bisnis-george-tahija-menyorot-pt-sumber-mineral-nusantara-2/>.

Dalam temuan dan laporan yang dikeluarkan oleh LIPI,⁶⁰ kasus di Kabupaten Bima, pengusaha dan penguasa menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Dari data yang dihimpun dalam beberapa wawancara dikatakan bahwa ada sejumlah nama pengusaha yang berada di belakang keberhasilan Bupati Ferry untuk berhasil menjadi orang nomor satu di Kabupaten Bima.⁶¹ Orang-orang inilah yang nantinya mendapatkan keuntungan atas kemenangan *incumbent* menjadi Bupati Bima.

Penutup

Dari paparan yang telah penulis uraikan di atas dan dengan mendasarkan pada perspektif yang dikemukakan oleh Charles Tilly maka tingkat hubungan politik antara negara atau Bupati Ferry dengan warga dalam konflik di Lambu dalam posisi yang terbatas atau tidak luas, terbatas dalam hal aman terlindungi dan pada posisi konsultasi yang tidak saling mengikat. Jika mendasarkan pada parameter-parameter milik Charles Tilly ini derajat demokrasi di Bima dalam kasus konflik Lambu masuk dalam kategori perpotongan antara kapasitas rendah demokratis dan kapasitas rendah tidak demokratis. Dalam kategori kapasitas rendah demokratis ditandai oleh adanya perjuangan kekerasan yang intensitasnya sering. Meski tidak termasuk dalam kategori perang sipil, namun konflik yang melibatkan ribuan warga dalam beberapa kali bentrokan antara negara dengan warga bisa masuk dalam kategori ini. Sementara itu, dalam kategori kapasitas rendah tidak demokratis yang digambarkan Charles Tilly gerakan sosial memang terjadi dengan intensitas sering, kegiatan kelompok kepentingan dan mobilisasi partai politik ditambah konsultasi formal (termasuk pemilihan kompetitif) juga sangat tinggi meskipun pemantauan keadaan kurang efektif, keterlibatan yang lebih tinggi dari pelaku legal dan setengah ilegal dalam politik lebih tinggi.

⁶⁰ Septi Satriani (Ed), *Dinamika Peran Elit Lokal pada Pemilu Bima 2010*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015).

⁶¹ Wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima dan Pimpinan Redaksi sebuah Media Cetak di Kabupaten Bima, 26 April 2011.

Hal inilah yang menjadi catatan kritis penulis atas perspektif yang ditawarkan oleh Charles Tilly. Perspektif milik Charles Tilly cenderung terlalu kuantitatif. Sementara realitas lapangan menyangkut demokrasi yang sifatnya kualitatif karena menyangkut fenomena sosial tidak selamanya bisa diukur menggunakan ukuran kuantitatif. Selain itu, parameter yang ditentukan oleh Charles Tilly tidak selamanya bisa diterapkan secara kaku karena seperti kasus konflik Lambu di atas ada beberapa parameter yang ternyata saling bersinggungan dan menyulitkan bagi penulis untuk memasukkan fenomena ini ke dalam kategori yang mana.

Daftar Pustaka

Buku

- Dwipayana, Ari. 2004. *Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*. Yogyakarta: IRE Press.
- Gaffar, Affan. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thohari, Amin. 2012. *Struktur Penguasaan Sumber Agraria dan Demokrasi Lokal*. Thesis Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM.
- Tilly, Charles. 2007. *Democracy*. New York: Cambridge University Press.
- Aspinall, Edward dan Gerry van Klinken (Ed). 2011. *The State and Illegality in Indonesia*. Jakarta: KITLV Press.
- O'Donnell, Guillermo dan Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi, Tinjauan Berbagai Perspektif*. LP3ES: Jakarta.
- Schulte Nordholt, Henk dan Gerry Van Klinken (Ed). 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV-YOI.
- Henley, Davidson, Moniaga (Eds.). 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV.
- Nusa Bhakti, Ikrar. 2000. *Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemony*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hiraswari Gayatri, Irine (Ed). 2009. *Dinamika Peran Toan Guru Pasca Orde Baru di Lombok Timur*. Jakarta: LIPI Press.
- AC Vel, Jacqueline. 2008. *Uma Politics: An Ethnography or Democratization of West Sumba Indonesia 1986-2006*. Leiden: KITLV.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo Media Utama.

Zulfan Tadjoeddin, Mohammad. 2011. *Electoral Conflict and The Maturity of Local Democracy in Indonesia: Testing the Modernisation Hypothesis*. University of Social Sciences.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo Media Utama.

Satriani, Septi (Ed). 2015. *Dinamika Peran Elit Lokal pada Pemilu Bima 2010*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

R Hadiz, Vedi. 2010. *Localising Power at Post Authoritarian in Indonesia: A Southeast Perspective*. California: Standford University Press.

R Brock, Willian. 1998. *Welfare, Democracy, and The New Deal*. New York: Cambridge University Press.

Twikromo, Y Argo. 2008. *The Local Elit and The Appropriation of Modernity: A Case in East Sumba Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Jurnal

Fattah, Abdoel. 2008. "Konflik Pasca Pilkada: Kasus Depok." *Jurnal Politik* 1 (1).

Surat Kabar dan Website

<http://kahaba.net/berita-bima/13880/bupati-bima-dipanggil-sang-khalik.html>.

<http://petapolitik.com/news/gurita-bisnis-georgetahija-menyorot-pt-sumber-mineral-nusantara-2/>.

<http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20110226/perlawanan-rakyat-paradomenolak-tambang-emas.html>.

<http://www.rimanews.com/read/20110214/16560/lokasi-tambang-emas-dirusak-massa>.

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/09/nas16.htm>.

<http://www.walhi.or.id/index.php/id/ruang-media/kumpulan-kronologis-kasus-sda/1860-kronologis-penolakan-tambang-emas-di-kec-lambu-kab-bima-ntb.html>.